

## Potential and Prospects of Halal Tourism in Improving Regional Economy

### (Case Study: Ciletuh Geopark, Sukabumi-West Java)

Diza Izet Islamy<sup>1</sup> Malida NurAnnisa<sup>2</sup> Iasha Nabila Harahap<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Bandung, Indonesia

dizaizetislamy@gmail.com

#### INFO ARTIKEL

##### Histori Artikel :

Tgl. Masuk: 8 Januari 2020

Tgl. Diterima: 10 Januari 2020

Tersedia Online: 29 Februari 2020

##### Keywords:

Potential and Job Prospects,  
Geoparak Ciletuh

#### ABSTRAK/ABSTRACT

*Sharia tourism is an activity that is supported by various facilities and services provided by the community, business people, government, and regional governments that meet the Sharia requirements. Where in the research this article focuses on the problem formula: (1) how the prospect of halal tourism in improving the regional economy in Sukabumi.*

*This research was conducted using descriptive methods and qualitative approaches, data collection techniques conducted were observation, interviews, literature studies and document studies. The validity of the data is done by using data triangulation techniques, namely by checking the data that has been obtained through several other data sources. The informants in this study consisted of the local community, PAPSI officials (Paguyuban Alam Pakidulan Sukabumi) as a local institution that had attention and focus on Ciletuh Geopark management activities, as well as informants from local government elements. The results of the study are: (1) the potential and prospects of this halal tourism carried out that there are several tourist areas that are run by the community or Community Based Tourism (CBT) which has 5 aspects. The five aspects that run in the Ciletuh Port of Batu Geopark Area include economic, social, cultural, religious, political. Participation of local communities in the development and development of the Sharia tourism village is essential to build independence and maintain the continuity of the Sharia tourism village activities. Therefore, the local community should not be seen as an object of the development of the Sharia tourism village as Raharjana (2012) stated that the community should play an active role as the subject of development activities, as well as for the development of the Sharia tourism village.*

## PENDAHULUAN

Terminology wisata Syariah di beberapa negara ada menggunakan istilah seperti *Islamic tourism*, *halal tourism*, *halal travel*, *ataupun as moslem friendly destination*. Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Indonesia No.2 Tahun 2014

tentang pedoman penyelenggaraan usaha wisata Syariah, yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia pada industri perbankan sejak tahun 1992. Dari industri perbankan berkembang ke sektor lain yaitu asuransi

syariah, pengadaan syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah.

Definisi pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah (Kemenpar, 2012). Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi.

Berdasarkan pengertian di atas, konsep syariah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah berhubungan dengan konsep halal dan haram di dalam islam. Halal diartikan dibenarkan, sedangkan haram diartikan dilarang. Konsep halal dapat dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan perspektif industri. Yang dimaksud dengan perspektif agama, yaitu sebagai hukum makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai keyakinannya. Ini membawa konsuekensi adanya perlindungan konsumen. Sedangkan dari perspektif industri. Bagi produsen pangan, konsep halal ini dapat diartikan sebagai suatu peluang bisnis. Bagi industri pangan yang target konsumennya sebagian besar muslim, diperlukan adanya jaminan kehalalan produk akan meningkatkan nilainya yang berupa intangible value. Contoh produk pangan yang kemasannya tercantum label halal lebih menarik bagi konsumen muslim (Hamzah & Yudianta, 2015).

Menurut Sofyan (2012:33), definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh World Tourism Organization (WTO), konsumen wisata syariah bukan hanya umat Muslim tetapi juga non-Muslim yang ingin menikmati kearifan lokal. Pemilik jaringan Hotel Sofyan itu menjelaskan, kriteria umum pariwisata syariah ialah;

pertama, memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum. Kedua, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan. Ketiga, menghindari kemusyrikan dan khurafat. Keempat, bebas dari maksiat. Kelima, menjaga keamanan dan kenyamanan. Keenam, menjaga kelestarian lingkungan. Ketujuh, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

Selain istilah wisata syariah, dikenal juga istilah Halal tourism atau Wisata Halal. Pada peluncuran wisata syariah yang bertepatan dengan kegiatan Indonesia Halal Expo (Indhex) 2013 dan Global Halal Forum yang digelar pada 30 Oktober - 2 November 2013 di Semeru Room, Lantai 6, Gedung Pusat Niaga, JIExpo (PRJ), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2013), President Islamic Nutrition Council of America, Muhammad Munir Caudry, menyampaikan bahwa, "Wisata halal merupakan konsep baru pariwisata. Ini bukanlah wisata religi seperti umroh dan menunaikan ibadah haji. Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim". Dalam hal ini hotel yang mengusung prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita (Wuryasti, 2013).

Seperti dalam jurnal sebelumnya, penelitian dengan judul *Diplomasi Pariwisata Halal* dalam penelitian tersebut menjelaskan pariwisata halal menjadi instrumen dalam melakukan diplomasi public yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah tersebut (Subarkah, 2018; 188-203). Penelitian Aan Jaelani, dengan judul *Halal Tourism Industry in Indonesia; Potential and Prospect* dengan hasil penelitian bahwa Indonesia dengan mayoritas Muslim begitu mudah mengembangkan wisata halal dan dapat menjadi kiblat dunia dalam wisata halal (Jaelani, 2017: 23-34). Ada juga penelitian dari Intan Komalasari yang berjudul *Upaya Indonesia Meningkatkan Daya Saing Muslim Friendly Tourism (MFT) Diantara Negara-Negara OKI* dengan hasil penelitian bahwa Indonesia

menunjukkan komitmen dalam pembangunan wisata yang ramah terhadap wisatawan Muslim dengan mengalokasikan anggaran secara khusus untuk pembangunan wisata halal, melakukan beberapa standarisasi sesuai berdasarkan kepada kesepakatan negara-negara anggota organisasi Kerjasama Islam, serta membuat konferensi untuk memperkenalkan konsep wisata halal (komalasari,2017:1-12). Dari ketiga penelitian tersebut menunjukkan adanya potensi yang positif bagi daerah yang ingin mengembangkan wisata halal yang didefinisikan sebagai segmen wisata berdasarkan ajaran-ajaran Islam namun tidak menutup kemungkinan dapat diperuntukkan bagi wisatawan non-Muslim, segmen wisata ini dianggap potensial dengan harapan dapat meningkatkan kunjungan wisata serta meningkatkan perekonomian.

Sehingga Jawa Barat memiliki salah satu Kabupaten dengan potensi yang menjanjikan bagi kemajuan pariwisata Syariah, yaitu Kabupaten Sukabumi yang terletak di bagian selatan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa prioritas pembangunan kepariwisataan diarahkan pada penciptaan destinasi wisata halal Sukabumi sebagai salah satu unggulan Pariwisata Syariah Jawa Barat, dimana persaingan dalam kepariwisataan yang semakin tajam, menuntut setiap wilayah untuk terus menggali potensi sumber daya agar berdaya jual, diminati dan dikunjungi wisatawan ([bappeda.sukabumikab.go.id](http://bappeda.sukabumikab.go.id)). Tulisan ini berupaya menggagas pengembangan desa wisata di Kawasan Geopark Ciletuh Sukabumi Selatan, dengan berlandaskan partisipasi (sumber-sumber) lokal yang ada. Pengembangan desa wisata dengan berbasiskan potensi lokal, baik potensi sosial-ekonomi-budaya-alam merupakan hal perlu dikembangkan untuk kemajuan masyarakat lokal. Pembangunan dan pengembangan desa wisata halal mulai dari perencanaan dan monitoring serta evaluasi yang tentunya mengedepankan Agama Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadits

serta melibatkan masyarakat lokal secara penuh dalam rangka menjaga kemandirian dan kontinuitas desa wisata halal di masa mendatang.

## **KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Ada dua konsep yang dapat menjelaskan tentang fenomena yang diteliti, yaitu diplomasi public sebagai upaya untuk menampilkan diri di dunia internasional agar menarik wisatawan dan investasi, dan konsep pariwisata halal sebagai upaya untuk menciptakan iklim wisata ramah terhadap wisatawan Muslim yang sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. 1. Diplomasi publik Diplomasi publik adalah cara suatu negara untuk menampilkan diri di pentas internasional dengan tujuan memberikan informasi atau pengetahuan terkait negara tersebut kepada publik melalui berbagai media. Namun, aktor dari diplomasi publik tidak hanya negara atau bersifat state-sentris, pemerintah daerah atau sub-state dapat melaksanakan diplomasi public. perbedaan antara diplomasi publik dan diplomasi tradisional dilihat dari target yang dituju oleh pelaku diplomasi, diplomasi publik dapat menjadikan individu, perusahaan multinasional, serta aktor non-negara lainnya sebagai sasaran dan aktor dalam melakukan diplomasi dan diplomasi tradisional lebih kepada hubungan antar negara sebagai aktor dan target diplomasi. Lebih lanjut, Effendi menjelaskan ada empat bagian dalam upaya melakukan diplomasi publik, yaitu: *introducing*, yaitu upaya memperkenalkan dapat melalui pameran, atau mengikuti event internasional; *increasing a positives appreciation*, dapat dilakukan untuk memenuhi pelayanan dan fasilitas; *engaging*, yaitu meningkatkan rasa keterkaitan dengan wisatawan dengan melakukan familiarization trip untuk mengenalkan wisata dan budaya; *influencing*, agar dapat meningkatkan kerjasama dalam bidang pariwisata.

### **Konsep Ekonomi Pariwisata Islam**

Organisasi Konferensi Islam (OKI) memberikan definisi wisata halal, terminologi yang digunakan OKI adalah Islamic Tourism yaitu Islam dan pariwisata didasari pada Al-Qur'an 29:20 yang menganjurkan manusia untuk melakukan perjalanan di bumi untuk mengambil pelajaran dari ciptaan Allah dan mengambil rahmat-Nya. Islamic Tourism didefinisikan sebagai perjalanan wisata yang ditujukan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas wisata bagi wisatawan Muslim sesuai dengan kaidah Islam. Adapun beberapa istilah yang digunakan selain Islamic Tourism, yaitu Halal Tourism, Syariah Tourism, Muslim-Friendly Tourism. (Organisasi Kerjasama Islam, 2017: 4). Penelitian di sini lebih memilih menggunakan wisata halal atau halal tourism karena kata tersebut lebih mewakili aspek wisata yang ramah terhadap wisatawan Muslim dan juga mewakili syariah Islam dengan kata 'Halal' yang tidak sekedar mewakili makanan dan minuman, tetapi juga hotel, fasilitas, dan pelayanan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan Global Muslim Travel Index (Global Muslim Travel Index, 2016:7) sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan wisata halal dunia menjelaskan bahwa wisata halal adalah pariwisata yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan memberikan fasilitas dan layanan yang ramah terhadap wisatawan Muslim.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder (Black,1999). Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik observasi, wawancara, studi literatur dan studi dokumen. Adapun validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi data, yaitu dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber data lainnya. Informan dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat lokal, pengurus PAPSI (Paguyuban Alam Pakidulan Sukabumi) sebagai kelembagaan lokal

yang memiliki perhatian dan fokus pada kegiatan pengelolaan Geopark Ciletuh, dan juga informan dari unsur pemerintahan setempat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai upaya dilakukan untuk mempersiapkan produk pariwisata ini bersama pemangku kepentingan, salah satu cara memperkenalkan Wisata Syariah di Indonesia kepada masyarakat dan dunia Internasional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan Global Halal Forum bertema Wonderful Indonesia as Moslem Friendly Destination pada 30 Oktober 2013 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Pentingnya dikembangkan potensi wisata syariah disampaikan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat peluncuran Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) di kawasan silang Monas, tanggal 17 November 2013. Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai banyak alasan untuk mengembangkan potensi wisata syariah, antara lain keberadaan ekonomi syariah penting untuk mengurangi kerentanan antara sistem keuangan dengan sektor riil, sehingga menghindari penggelembungan ekonomi; menghindari pembiayaan yang bersifat fluktuatif, dan dapat memperkuat pengaman sosial.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan wisata syariah adalah mempersiapkan 13 (tiga belas) provinsi untuk menjadi destinasi wisata syariah, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali. Namun dari ke-13 provinsi tersebut yang dinyatakan siap yaitu Jakarta, Jawa Barat, NTB, Yogyakarta, dan Jawa Timur.



**Gambar 1**  
**9 Destinasi Wisata Halal di**  
**Indonesia**

Penilaian kesiapan destinasi wisata dilihat dari beberapa aspek utama pariwisata, yaitu:

- 1) Produk Pengembangan Produk harus berdasarkan Kriteria Umum dan Standarisasi yang diterapkan untuk Usaha Pariwisata Syariah dan Daya Tarik.
- 2) SDM dan kelembagaan Kompetensi Profesi Insan Pariwisata Syariah juga harus ditunjang dengan Training dan Pendidikan yang sesuai dengan sasaran Standar Kompetensi yang dibutuhkan Wisatawan Muslim.
- 3) Promosi, Bentuk promosi dan jalur pemasaran disesuaikan dengan perilaku Wisatawan Muslim, World Islamic Tourism Mart (WITM), Arabian Travel Mart, Emirates Holiday World, Cresentrating.com, halaltrip.com, etc.

Meskipun konsep halal sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian besar penduduk Indonesia, namun wisata halal kurang berkembang di Indonesia dikarenakan fasilitas, tidak mudah memastikan makanan halal, sertifikasi halal, dan promosi yang kurang. Hal tersebut tampak dari hasil laporan lembaga riset dan pemeringkat industri pariwisata halal Cresentrating bersama MasterCard, Global Muslim Travel Index (GMTI) 2015, Indonesia berada di urutan keenam tujuan wisata halal dunia, di bawah Malaysia dan Thailand. Cresentrating menilai Indonesia harus berusaha lebih keras jika ingin melangkahi Malaysia dan Thailand dalam mengembangkan wisata halal. Menurut pendiri dan CEO Cresentrating Fazal Bahardeen bahwa Indonesia belum begitu

agresif dalam mempromosikan wisata halal seperti negara tetangga Malaysia dan Thailand. Indonesia juga belum mengintegrasikan promosi pariwisata halal ke dalam program pariwisata nasional, dan membuat paket khusus wisata halal.

Perbandingan Praktek Wisata Syariah antara Indonesia dengan beberapa negara ASEAN lainnya pada tahun 2013, dapat dilihat sebagai berikut:

Negara	Total Wisman	Wisman Muslim	%	Praktik Wisata Syariah
Indonesia	8.802.129	1.729.912 (ME:183.016)	20%	12 Hotel Syariah Bersertifikat
				25 Hotel dengan Restoran Halal Bersertifikat
				305 Restoran Bersertifikat Halal
				0 Spa Syariah Bersertifikat
				1 Travel Syariah Bersertifikat

Kawasan Geopark Nasional Ciletuh yang diresmikan pada tanggal 22 Desember 2015 terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Ciemas dan Kecamatan Ciracap yang meliputi lima belas desa pada masing-masing Kecamatan tersebut terdiri dari Sembilan desa di Kecamatan Ciemas, meliputi Desa Tamanjaya, Ciwaru, Girimukti, Mekarsakti, Ciemas, Mandrajaya, Cibenda, Sidamulyo, serta Desa Mekarjaya dan enam desa di Kecamatan Ciracap yang meliputi Desa Gunungbatu, Cikangkung, Mekarsari, Ujunggenteng, Pangumbahan, dan Purwasedar. Cakupan area kedua kecamatan tersebut seluas 45.820 Ha.

Dengan menduduki area seluas 45.820 Ha, Kawasan Geopark Nasional Ciletuh terbagi menjadi beberapa area, yaitu (1) Area Konservasi yang meliputi Suaka Margasatwa Cikepuh, Cagar Alam Cibanteng, Penyu Pangumbahan dan Situs Budaya (2) Area Budidaya yang meliputi Tambak, Perkebunan, Pertanian, Pemukiman dan Hutan Produksi; (3) Area khusus yaitu Kawasan wisata, pantai/laut, curug/air terjun, agrowisata dan wisata budaya. Berbagai kekayaan, keunggulan dan bahkan prasyarat sebuah area dapat dinyatakan sebagai sebuah Kawasan Geopark.

Gambaran utuh dari Kawasan Geopark Nasional Ciletuh adalah seperti tampak pada peta di bawah ini :



**Gambar 2**  
**Kawasan Geopark Nasional Ciletuh**  
**Nov-2019**

Seiring dengan upaya mendorong pertumbuhan dan pengembangan Geopark Nasional Ciletuh, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen dan memperjuangkan perluasan Kawasan Geopark Nasional Ciletuh yang semula hanya mencakup dua kecamatan yang terdiri dari lima belas desa, pada tanggal 21 Juni 2016 diresmikan perluasan cakupan wilayahnya menjadi delapan kecamatan yang terdiri dari tujuh puluh empat desa dan sekaligus diresmikan perubahan namanya oleh pemerintah provinsi menjadi Geopark Nasional Ciletuh – Palabuhanratu dengan luas 126.100 Ha atau setara dengan 1.261 Km<sup>2</sup>. upaya perluasan wilayah kawasan Geopark Nasional Ciletuh – Palabuhanratu ini ditujukan agar kawasan Geopark Nasional Ciletuh – Palabuhanratu ini dapat masuk ke dalam jaringan Geopark dunia atau UNESCO Global Geopark (UGG) yang akan diputuskan oleh UNESCO pada tanggal 22 Desember 2017. (Rosana, MF., 2017)

Batas-batas Kawasan Geopark Nasional Ciletuh-Palabuhanratu yang terdiri dari delapan kecamatan dan secara geoarea terbagi menjadi tiga geoarea, yaitu : (1) Cisolok Geoarea yang dalam pengembangannya mengusung tema *Ancient Magmatic Sone Shifting*. (2) Jampang Geoarea yang dalam pengembangannya mengusung tema

*Jampang Plateau Lanscape* DAN (3) Ciletuh Geoarea yang dalam pengembangannya mengusung tema *Subduction Zone Uplifted Rocks*. Tentunya berbagai geoarea tersebut menawarkan daya Tarik dan keunggulannya masing-masing bagi para wisatawan untuk datang berkunjung. Di tengah berbagai macam keindahan dan beragam potensi alam yang ditawarkan oleh kawasan Geopark ataupun berbagai macam destinasi wisata lainnya yang terletak di remote area. Maka keberadaan infrastruktur dan *amenity care* lainnya menjadi hal penting yang harus dipersiapkan dan disediakan bagi Pariwisata Syariah yang akan di dikembangkan di wilayah tersebut.

**Tabel 1**  
**Data Jumlah Pengunjung Geopark**  
**Ciletuh Palabuhan-Ratu**

Tahun	Bulan	Wisatawan Domestik	Wisatawan Asing	Jumlah
2014	Januari	60	4	64
	Februari	68	-	68
	Maret	68	-	68
	April	77	-	77
	Mei	60	4	64
	Juni	85	-	85
	Juli	63	-	63
	Agustus	81	-	81
	September	69	6	75
	Oktober	85	-	-
	November	89	-	-
	Desember	99	8	107

Sumber: PAPSI (2015)

### Partisipasi Masyarakat Lokal Geopark Ciletuh Dalam Pengembangan Pariwisata Syariah di kawasan Geopark Ciletuh

Di Geopark Ciletuh, pengembangan dilakukan bersama-sama, baik itu pemerintah, swasta dan tentunya masyarakat lokal pun punya andil dalam pengembangan dan pengelolaan aktifitas wisata disana. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan suatu kawasan wisata berbasis CBT adalah sesuatu yang penting dan menjadi kunci sukses dalam pengelolaan kawasan yang berkelanjutan. PAPSI (Paguyuban Alam Pakidulan Sukabumi) adalah tonggak utama dalam pengelolaan geowisata di Kawasan

Geopark Ciletuh yang berbasis partisipasi masyarakat.

Pada awalnya PAPSI melihat dan menyadari adanya potensi alam di Ciletuh yang bisa dikembangkan dengan asas berkelanjutan. PAPSI mempersentasikan proposal kerjasama dan membawa satu staf PT. Bio Farma untuk datang ke Ciletuh dan mengajak bekerja sama dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan Kawasan yang ada di Ciletuh dengan cara CSR (Corporate Social Responsibility) yang memang sudah biasa dilakukan oleh PT. Bio Farma di berbagai daerah sebagai rasa tanggung jawab pada sosial. Oleh pihak Pemda Kabupaten Sukabumi, dan Pemprov Jawa Barat. Kerjasama ini tak langsung disambut positif oleh masyarakat, tapi dengan gigih PAPSI sebagai masyarakat tonggak utama yang bertanggung jawab dalam pengembangan Kawasan Geopark Ciletuh tetap berusaha mengajak masyarakat dengan berbagai cara yang dibantu oleh pihak-pihak lain untuk sama-sama memajukan dan ikut mensejahterakan dengan cara ikut berpartisipasi dalam pengembangan Kawasan ini. Hingga saat ini beberapa masyarakat sudah mau ikut andil dalam pengembangan dan pengelolaan geowisata di Kawasan Geopark Ciletuh Pelabuhanratu.

Dalam pengembangan suatu kawasan wisata yang dijalankan oleh masyarakat atau Community Based Tourism (CBT) memiliki 5 aspek. Kelima aspek yang berjalan di Kawasan Geopark Ciletuh Pelabuhanratu diantaranya ekonomi, sosial, budaya, agama, politik.

Sebuah destinasi dapat dikatakan sudah mulai melakukan pengembangan wisata manakala sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Untuk dapat meningkatkan potensi pariwisatanya, maka yang perlu dilakukan adalah merencanakan pengembangan wisata agar dapat lebih baik dari sebelumnya. Tiga prinsip utama dalam sustainability development (Mc Intyre, 1993: 10) :

1. Ecological Sustainability, yakni memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan sesuai dengan proses

ekologi, biologi, dan keragaman sumber daya ekologi yang ada.

2. Social and Cultural Sustainability, yaitu memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat tersebut.

3. Economic Sustainability, yaitu memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan efisien secara ekonomi dan bahwa sumber daya yang digunakan dapat bertahan bagi kebutuhan di masa mendatang.

Pengembangan Kawasan Geopark sejalan dengan ekowisata yang secara aktif menyumbang kegiatan konservasi alam dan budaya, melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan, memberikan sumbangan positif terhadap kesejahteraan masyarakat, serta dilakukan dalam bentuk wisata independent atau diorganisasi dalam bentuk kelompok kecil (UNEP, 2000: 2003). Dengan kata lain ekowisata adalah bentuk, industry pariwisata berbasis lingkungan yang memberikan dampak kecil bagi kerusakan alam dan budaya lokal sekaligus menciptakan peluang kerja dan pendapatan serta membantu kegiatan konservasi alam itu sendiri (Panos, dikutip oleh Ward, 1997).

Dengan demikian, upaya peningkatan kapasitas dan pendapatan masyarakat menjadi sebuah keharusan, karena bagaimanapun kegiatan pariwisata tidak terlepas dari Agama dan interaksi masyarakat sekitar dengan para wisatawan. (Dewi, Fandeli, Baiquni, 2013).

Melihat bahwa pembangunan pariwisata berbasis Syariah akan berkelanjutan atau dapat terus dilakukan melalui pengembangan desa-desa wisata lainnya. Sebab melalui pengembangan desa wisata tersebut dapat diharapkan tercapainya hasil yang sesuai dengan konsep Ke-Islaman atau Syariah dalam pengembangan pariwisata tersebut. Kehadiran pengelolaan desa wisata menjadikan produk wisata lebih menunjukkan identitas budaya pedesaan tersebut.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, terdapat beberapa poin penting yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan berbagai pihak terkait dalam upaya pembangunan Kawasan Geopark agar dapat menjadi kawasan pariwisata Syariah dengan upaya pembangunan daerah di sekitarnya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas infrastruktur guna memudahkan para wisatawan untuk menuju objek wisata serta mengembangkan potensi-potensi objek wisata yang dibutuhkan oleh para wisatawan namun tetap berdasarkan kepada Ke-Islaman atau Syariah.
2. Pemerintah pusat perlu segera memperlihatkan objek wisata unggulan ini, karena fasilitas kegiatan wisata dan lingkungan yang ada di kawasan wisata ini sangat minim, sehingga masih kurang nyaman dan amannya untuk dikunjungi.
3. Pemerintah perlu melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat, terutama untuk pendanaan dan pengelolaan untuk pendanaan.
4. Mempromosikan secara terus-menerus dengan even-even tahunan dan juga melakukan promosi melalui media cetak dan elektronik.
5. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di lokasi objek wisata agar dapat menciptakan karya-karya kreatif sebagai daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung dan mau membelanjakan uang mereka atas hasil karya masyarakat setempat.
6. Dalam upaya mengantisipasi terjadinya bencana yang tidak dapat diperkirakan. Dapat disiasati dengan upaya memberikan penyuluhan dan pelatihan terhadap masyarakat lokal ketika terjadi bencana dan juga meningkatkan kualitas fasilitas yang berbasis mitigasi bencana, agar wisatawan tetap merasa aman.
7. Peran serta masyarakat lokal dalam pembangunan dan pengembangan wisata Geopark Ciletuh menjadi Kawasan wisata Syariah mejadi bagian penting. Partisipasi hakiki

masyarakat lokal dengan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan tahapan pengembangan, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan program pengembangan desa wisata (Dewi, Fandeli, Balquni, 2013; Raharjo, ST.,2015).

Keikutsertaan aktif masyarakat lokal dalam setiap tahapan kegiatan, diharapkan dapat pengetahuan dan kesadaran, dan kemandirian masyarakat lokal. Lebih jauh lagi, impact kesejahteraan masyarakat lokal dapat terwujud secara berkesinambungan.

Partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata Syariah tersebut merupakan hal esensial untuk membangun kemandirian dan menjaga kesinambungan kegiatan desa wisata Syariah tersebut. Oleh karena itu, masyarakat lokal sebaiknya tidak dipandang sebagai objek dari pembangunan desa wisata Syariah tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Raharjana (2012) bahwa masyarakat sudah semestinya berperan aktif sebagai subjek dari kegiatan pembangunan, demikian pula untuk pembangunan desa wisata Syariah tersebut. Masyarakat perlu dilibatkan sejak awal, dalam proses perencanaan pembangunan kepariwisataan Syariah tersebut. Upaya-upaya tersebut tentu saja tidak dilakukan pemangku kepentingan utama (stakeholders) dan kepentingan dalam kegiatan pengembangan ekowisata berbasis Syariah tersebut.

## **KESIMPULAN**

Wisata halal dapat dijadikan sebagai alternatif dalam meningkatkan perekonomian daerah karena potensi pasar yang terus mengalami peningkatan, serta wisatawan millennial dengan karakteristik tersebut daerah seperti Geopark Ciletuh, Sukabumi-Jawa Barat dapat melakukan memenuhi indikator dalam memenuhi kebutuhan fasilitas dan layanan bagi wisatawan Muslim, dengan target pasar utama wisatawan Timur Tengah yang menghabiskan uang untuk berwisata cukup tinggi.



## IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Namun perlu diingatkan bahwa wisata halal ini tidak hanya diperuntukkan bagi wisatawan Muslim, wisatawan non-Muslim pun dapat menikmati produk, fasilitas dan layanan wisata halal tersebut.

## REFERENCES

Achyar, Mahfud. (2015, Juli 1). Indonesia Sebagai Tujuan Halal Tourism. Dipetik Agustus 5, 5,

Admin. (2015, mei 17). Halal Tourism dan Lifestyle. Dipetik Agustus 30, 2015, dari [bppdt.com](http://bppdt.com)

Hamzah, Maulana. M., & Yudiana, Yudi. (2015, Februari 9). Analisis Komparatif Potensi Industri Halal dalam Wisata Syariah dengan Konvensional. Dipetik Agustus 4, 2015, dari <http://catatanek18.blogspot.co.id>:

IndonesiaTravel. (2013, Oktober 30). Pariwisata Syariah Indonesia. Dipetik Agustus 4, 2015, dari [www.indonesiatravel.id](http://www.indonesiatravel.id):

Amirin, Tatang M. (1986) Menyusun Rencana Penelitian. Rajawali Jakarta

Dowling, R. & Newsome, D. (Eds.). (2006). Geotourism, sustainability, impacts and management. Oxford: Elsevier, Butterworth Heinemann.

Nurhidayanti. (2010). Pengembangan Agrowisata Berkelanjutan Berbasis Komunitas di sukabumi.

[https://www.academia.edu/1974608/Analysis\\_of\\_Network\\_Activities\\_in\\_Geoparks\\_as\\_Geotourism\\_Destinations](https://www.academia.edu/1974608/Analysis_of_Network_Activities_in_Geoparks_as_Geotourism_Destinations) [online] (Diakses 27 Februari